

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA PADA PUS RESIKO TINGGI 4 TERLALU DI KABUPATEN BOJONEGORO

Mohammad Khanif¹, Ahmad Suprastiyo², Cahya Lukito³
Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Bojonegoro
Jl. Lettu Suyitno No 2 Bojonegoro
Email: tiyopras207@gmail.com

Abstract

This research started from the researcher's interest in seeing the existence of a Family Planning Program in high risk EFA 4 too, data collection was originally carried out using the R/1/EU formula or manual data collection, but currently data recording based on information systems has been carried out to find out age partners. high risk fertile and able to reduce maternal and child mortality in Bojonegoro Regency. This study aims to review the EFA data records and describe the implementation of the family planning program at the Office of Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning, Bojonegoro Regency. The type of research in this research is descriptive research with a qualitative approach. This study focuses on the implementation of the family of hope program in increasing the level of education by using the four implementation factors proposed by George Edwards III, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data Collection Techniques in the Form of Observation, Interview and Documentation. The results showed that the family planning program at PUS was running well and the impact of the family planning program on high risk EFA through the PUS alarm system was quite positive. Keywords : Implementation, Family Planning Program, High Risk Center 4

Abstrak

Penelitian ini berawal dari ketertarikan peneliti dalam melihat adanya Program Keluarga Berencana pada PUS resiko tinggi 4 terlalu yang dilakukan pendataan yang semula menggunakan formulir R/1/PUS atau pendataan secara manual namun pada saat ini telah dilakukan rekam data berbasis sistem informasi yang dapat mengetahui pasangan usia subur resiko tinggi dan mampu menekan angka kematian ibu dan anak di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau rekam data PUS dan mendeskripsikan implementasi pada program keluarga berencana di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro. Adapun jenis penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada implementasi program keluarga harapan dalam peningkatan taraf pendidikan dengan menggunakan empat faktor implementasi yang dikemukakan oleh George Edwards III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teknik Pengumpulan Data Berupa Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program keluarga berencana pada PUS sudah berjalan dengan baik dan dampak berjalannya program keluarga berencana pada PUS resiko tinggi 4 terlalu melalui PUS alarm system pun cukup positif.
Keywords : Implementasi, Program KB, Pus Resiko Tinggi 4

PENDAHULUAN

Program Keluarga Berencana memberikan pengetahuan tentang metode-metode kontrasepsi dan cara mengelolanya sehingga dapat mengatur kehamilan dengan metode yang tepat (Mustafa *et. al.*, 2015).

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro dan Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro yang membidangi dalam pemberdayaan, perlindungan anak dan perempuan serta keluarga berencana. kemudian sesuai dengan Rencana Strategi Dinas tahun 2018- 2023 bahwa Program dan Kegiatan Keluarga Berencana ialah pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, pengendalian distribusi alat dan obat kontrasepsi, pembinaan kesertaan KB dan penyerasian kebijakan pembangunan kependudukan, data dan informasi. Adapun rencana tersebut mempunyai indikator kinerja, sasaran program (outcome) dan Kegiatan (output) yaitu prosentase penurunan unmet need, dalam Program Keluarga Berencana, unmet need menjadi bahasan yang sangat penting karena unmet need adalah persentase perempuan usia subur yang tidak menggunakan kontrasepsi, tetapi tidak menginginkan anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan (Bradly *et.al*, 2012). Data awal 6,13 di tahun 2018 dengan target kinerja menjadi 6,00 di tahun 2023, melalui peningkatan jumlah peserta KB. Penyediaan pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi, pengendalian alat dan obat kontrasepsi, pembinaan kesertaan KB

serta penyediaan data dan informasi KKBPK adalah Program dan kegiatan Dinas P3AKB yang akan dilaksanakan. Adapun tujuan sebagaimana sasaran jangka menengah perangkat daerah yang akan di capai Dinas P3AKB salah satunya ialah mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan indicator tujuan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan menurunnya angka kelahiran total per wanita usia subur dengan indikator Total Fertility Rate (TFR).

Keluarga Berencana adalah tindakan yang membantu individual atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran kelahiran yang tidak di inginkan atau mengatur interval anatara kehamilan (Hartanto, 2004:27) Keluarga Berencana merupakan usaha dalam menekan lonjakan angka kelahiran di Indonesia, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi disebabkan pula penyebaran penduduk yang kurang merata antara pulau, sebagai upaya pelayanan kesehatan preventif yang paling dasar dan paling utama, yang merupakan alasan utama diperlukan keluarga berencana untuk mencegah mortalitas dan mobilitas Pasangan Usia Subur.

Pasangan Usia Subur (PUS) yang menikah dini juga penting untuk ikut serta dalam program dan kegiatan keluarga berencana agar dapat meningkatkan pengetahuan yang dimiliki terhadap KB dan pernikahan dini. PUS dapat memperoleh informasi yang memadai dan mengurangi ketakutan terhadap efek samping kontrasepsi melalui konseling dalam program KB yang efektif. Menjadi sangat penting lagi apabila perempuan usia subur ini adalah dari Pasangan Usia Subur (PUS) Resiko Tinggi, yaitu PUS yang mengalami resiko tinggi dengan kondisi “4 Terlalu” yaitu Terlalu Muda (usia istri kurang dari 20 tahun), Terlalu Tua (usia istri lebih dari 35 tahun), Terlalu Rapat (jarak kelahiran kurang dari 2

tahun) dan terlalu Sering (melahirkan 4 kali atau lebih).

Apabila PUS dengan “4 Terlalu” ini mengalami kehamilan maka kehamilannya tergolong resiko tinggi yang akan memperberat resiko terjadinya kematian. Penyuluh Keluarga Berencana Berdasarkan Keputusan No. Kep/120 M.PAN/9/2004 adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan keluarga. Program kebijakan yang di buat oleh Dinas P3AKB berbasis teknologi penting yang mempunyai fungsi untuk meningkatkan efisiensi kegiatan karena di era digital ini yang semakin maju pemerintah harus lebih sensitive serta tanggap dalam memanfaatkan system teknologi yang ada, dengan modernisasi ini merupakan strategi jitu Dinas P3AKB selaku penyelenggara untuk menjawab tantangan kemajuan zaman. Tindak lanjut program keluarga berencana pada PUS resiko tinggi 4 terlalu yang lebih dikenal dengan PUS Alarm System (PAS), telah di rilis pada bulan juni tahun 2019, kemudian sudah berjalan kurang lebih dari 2 tahun, PAS yang dapat di unduh melalui menu Play Store dari ponsel yang berbasis android. Sehingga dapat membantu penyuluh KB selaku pelaksana dalam terlaksananya tindak lanjut penanganan PUS yang berkesinambungan dan berjenjang berbasis wilayah kerja penyuluh KB dan dapat terintegrasi dalam penunjang pencegahan kematian ibu hamil atau melahirkan, kematian bayi. Selain itu dapat menghemat waktu, biaya, tenaga dan juga petugas Penyuluh KB juga dapat mengakses PAS ini kapan saja dan dimana saja dengan mudah.

Sesuai dengan hasil observasi dan wawancara pada faktor Komunikasi implementasi program keluarga berencana pada PUS resiko tinggi 4 terlalu, belum

berjalan secara maksimal karena terdapat petugas penyuluh KB yang belum memahami tentang tujuan dan pelaksanaannya secara gamblang. Pada faktor sumber-sumber daya terdapat kendala-kendala yang dialami terkait dengan staf tenaga admin ternyata tidak hanya fokus di dalam pengelolaan data PUS akan tetapi menjalankan beberapa tugas pokok lainnya diantaranya ikut serta dalam pelaksanaan pelayanan KB, perencanaan anggaran dan pembuatan surat pertanggung jawaban yang bukan pada program keluarga berencana pada PUS resiko tinggi 4 terlalu. Lalu terdapat kekurangan petugas penyuluh KB di beberapa kecamatan serta wewenang belum ada uji kompetensi terkait implemtasi program keluarga berencana pada PUS resiko tinggi 4 terlalu melalui PUS alarm system, serta pada fasilitas terdapat kesulitan signal. Kemudian pada faktor kecenderungan dan sikap birokrasi terdapat permasalahan dimana belum ada sifat tegas bagi pembuat kebijakan yaitu belum adanya punishment dan reward untuk petugas penyuluh KB. Sedangkan pada faktor struktur birokrasi belum adanya pertemuan secara intensif antara pembuat kebijakan dan pelaksanaan program keluarga berencana pada PUS resiko tinggi 4 terlalu dengan stakholder, hal ini peneliti temukan pada saat di lapangan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Bojonegoro. Fokus penelitian ini ialah 1) komunikasi, 2) Sumber Daya, 3) Disposisi, 4) Struktur Birokrasi Pengambilan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, dalam proses penelitian terinventarisir sumber data primer sebanyak 12 informan.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder

dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Dalam menganalisa menggunakan teknik analisis data interaktif *Model miles and Huberman*, yang mengemukakan bahwa “aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktifitas dalam analisis data, yaitu *data reduction, data display and conclusion drawing/verifying*” (Sugiyono dalam Suprastiyo, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Menyampaikan bahwa Dinas P3AKB Kabupaten Bojonegoro telah melakukan komunikasi secara konsisten terkait implementasi program keluarga berencana pada PUS resiko tinggi 4 terlalu dan petugas Penyuluh KB telah melaksanakan program tersebut sesuai dengan alur mekanisme yang telah diberikan oleh pembuat kebijakan dengan telah di berikan Informasi melalui layanan yang dapat diakses secara online, melalui google play store / app store yang terdapat di smartphone, bisa melalui Whatsapp dan Bisa juga melalui nomor telephone admin yang telah ditentukan oleh OPD.

Dengan adanya komunikasi tentang tujuan dari pengimplementasian program keluarga berencana PUS resiko tinggi 4 terlalu implementator dapat mengetahui tujuan-tujuan dari adanya program keluarga berencana pada PUS tersebut dan dari beberapa pendapat yang disampaikan dapat diketahui bahwa program ini memiliki tujuan secara umum yaitu untuk memantauan PUS Risiko Tinggi/ Resti 4 Terlalu yang dapat menyediakan data PUS yang valid dan update sehingga dapat memudahkan petugas penyuluh KB dalam menunjang pencegahan kematian ibu hamil/melahirkan dan kematian bayi/ balita dalam menurunkan Angka Kematian Ibu

(AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Hal ini berdasarkan temuan dilapangan teori yang digunakan sudah ada kesesuaian bahwa suatu pengimplementasian dari suatu program keluarga berencana dapat berjalan efektif apabila tujuan dari program tersebut telah dikomunikasikan, namun tidak adanya kesamaan dalam mengemukakan tujuan secara benar dari petugas penyuluh KB tentang implementasi program keluarga berencana pada PUS resiko tinggi 4 terlalu, maka menandakan bahwa kebijakan ini telah di informasikan tetapi penyuluh KB kurang memahami. Dalam hal ini sesuai dengan apa yang ditemukan oleh peneliti di lapangan.

2. Sumberdaya

Dengan analisa data dapat diketahui bahwa Pasangan Usia Subur Alarm System hanya dapat diakses oleh tenaga admin dan petugas penyuluh KB yang datanya telah terdaftar dalam PUS Alarm System tersebut. Temuan tersebut sudah sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Edward III, bahwa suatu implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif apabila di jalankan oleh tenaga yang ahli dalam bidangnya.

Meskipun dalam kenyataannya tata cara yang dilakukan belum maksimal karena kurangnya tenaga ahli yang tersedia hanya satu tenaga admin dalam pengimplementasian program keluarga berencana PUS resiko tinggi 4 terlalu melalui PUS Alarm System sehingga Dinas P3AKB telah melakukan Bimbingan Teknis dan Monitoring serta evaluasi. Teori yang dikemukakan oleh Edward III terkait dengan pemberian wewenang sebagai penunjang dalam mengimplementasikan kebijakan telah sesuai dengan apa yang peneliti temukan pada saat di lapangan karena berbagai bentuk perintah oleh pemberi kebijakan telah melakukan bimbingan teknis dan monitoring serta evaluasi kepada petugas penyuluh KB.

Adapun fasilitas perlengkapan untuk menunjang pelaksanaan program keluarga berencana pada PUS resiko tinggi 4 terlalu dapat diketahui bahwa Dinas P3AKB Kabupaten Bojonegoro telah memberikan fasilitas dalam pengelolaan dan pelaporan data PUS. Hal ini juga didukung dengan adanya jaringan internet, sosialisasi, bimbingan teknis dan narasumber selain fasilitas tersebut juga adanya Tab dan kendaraan roda dua serta pagu anggaran yang bersumber dana bantuan dana oprasional keluarga berencana (BOKB) dan Dana Bagi Hasil Migas (DBHM), dengan demikian, teori yang dikemukakan oleh Edward III terkait dengan pemberian fasilitas sebagai penunjang dalam mengimplementasikan kebijakan telah sesuai dengan apa yang peneliti temukan pada saat di lapangan, karena fasilitas yang disediakan sebagai penunjang untuk pengelolaan data PUS.

3. Disposisi

Berdasarkan pada beberapa hasil wawancara tentang kepatuhan pelaksana dalam mengimplementasikan program keluarga berencana pada data pencatatan dan pelaporan PUS dapat diketahui bahwa para pelaksana telah melakukan pencatatan dan pelaporan yang sesuai dengan mekanisme oprasional. PUS Alarm System jauh lebih simple jika dibandingkan dengan buku rekam secara data manual. Memang pada awal pemasukan data PUS terbilang lama, namun jika sudah memasuki data kunjungan maka petugas Penyuluh KB Kecamatan dapat memasukkan rekam data durasi waktu yang cepat sehingga dapat mempermudah para petugas penyuluh kb dan admin dalam mendeteksi dan melacak. Unmet Need (IAT dan TIAL), PUS waktunya kunjungan ulang (Implant dan IUD sudah > 3 Th, suntik sudah >3 bulan), PUS Hamil sudah melewati taksiran kelahiran, PUS sudah masuk masa menopause (>49 Th), dan kurangnya update data berkelanjutan.

4. Struktur Birokrasi

Terkait dengan implementasi program keluarga berencana PUS resiko tinggi 4 terlalu telah dikuatkan dalam surat keputusan kepala Dinas P3AKB Kabupaten Bojonegoro tentang Penerapan Program dan Tim Pengelola di tahun 2019 .Selain terdapat dalam surat keputusan Kepala Dinas P3AKB terdapat juknis dalam menjalankan PUS Alarm System, hal ini menunjukkan bahwa standar oprasional prosedur diupayakan dalam pelaksanaan program-program dapat dilaksanakan tanpa adanya peraturan yang berbelit dan disesuaikan dengan sumber yang ada sehingga adanya keseragaman. Petunjuk Teknis ini merupakan Standar Operational Procedure (SOP) dalam mengimplementasikan. Dalam teorinya, Edward III mengemukakan adanya Standar Operational Procedur (SOP) dapat membuat struktur birokrasi lebih kondusif. Hal ini dilakukan agar organisasi tersebut dapat membantu Dinas P3AKB Kabupaten Bojonegoro dalam memudahkan untuk melaksanakan pelayanan PUS Risti 4 Terlalu. Dengan demikian berdasarkan wawancara diatas, teori yang dikemukakan oleh Edward III terkait dengan Standar Operational Procedur (SOP) ternyata terdapat petunjuk teknis dan alur kerja PUS Alarm System hal ini menunjukkan bahwa hal tersebut sesuai dengan apa yang ditemukan oleh peneliti.

SIMPULAN

1. Pada Aspek Komunikasi, bahwa Dinas P3AKB Kabupaten Bojonegoro telah melakukan komunikasi secara konsisten terkait implementasi program keluarga berencana pada PUS resiko tinggi 4 terlalu kepada petugas penyuluh KB, layanan yang dapat diakses secara online, melalui google play store / app store yang terdapat di smartphone, bisa

melalui Whatsapp dan Bisa juga melalui nomor telephone admin yang telah ditentukan oleh OPD.

2. Pada aspek Sumberdaya, bahwa data PUS hanya dapat diakses oleh tenaga admin dan petugas penyuluh KB yang telah terdaftar dalam PUS Alarm System, Dinas P3AKB Kabupaten Bojonegoro sebagai pembuat kebijakan terkait PUS Alarm System telah menyampaikan perihal informasi tata cara melalui kegiatan sosialisasi dan tindak lanjut penanganan PUS Resiko tinggi 4 terlalu di Tahun 2019 dan pada saat di lapangan karena berbagai bentuk perintah oleh pemberi kebijakan Dinas P3AKB telah melakukan bimbingan teknis dan monitoring serta evaluasi kepada petugas penyuluh KB.
3. Pada aspek Disposisi, Penyuluh KB Kecamatan dapat memasukkan rekam data durasi waktu yang cepat sehingga dapat mempermudah para petugas penyuluh KB dan admin dalam mendeteksi dan melacak Unmet Need (IAT dan TIAL), PUS waktunya kunjungan ulang (Implant dan IUD sudah > 3 Th, suntik sudah >3 bulan), PUS Hamil sudah melewati taksiran kelahiran, PUS sudah masuk masa menopause (>49 Th), dan kurangnya update data berkelanjutan. Dengan penunjukan atau pengangkatan beberapa Petugas Penyuluh KB untuk menjadi koordinator di balai penyuluhan di kecamatan telah Menunjukkan sikap sebagai birokrasi dan petugas penyuluh KB yang tidak mengimplementasikan program keluarga berencana PUS resiko tinggi 4 terlalu tidak diberikan punishment dan reward bagi penyuluh KB Dinas P3AKB hanya memberikan pendampingan dan desk.
4. Pada aspek struktur birokrasi, bahwa implementasi program keluarga

berencana PUS resiko tinggi 4 terlalu telah dikuatkan dalam surat keputusan kepala Dinas P3AKB Kabupaten Bojonegoro tentang Penerapan Program dan Tim Pengelola di tahun 2019 dan juknis dalam menjalankan PUS Alarm System, Dalam ikut serta mengimplementasikan program keluarga berencana pada PUS resiko tinggi 4 terlalu sebagai penanggung jawab ialah Dinas P3AKB dan petugas penyuluh KB yang berkewajiban untuk melakukan koordinasi terkait dengan implementasi program keluarga berencana pada PUS.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Haedar. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No.1, 2010.
- Athica oviana. Penyuluhan tentang KB terhadap peningkatan pengetahuan pada Pasangan Usia Subur.2016
- BKKBN. Peningkatan Akses Dan Kualitas Pelayanan KB. BKKBN Bandung, 2007
- BKKBN. Pasangan Usia Subur Melalui Mini Survei Indonesia . Jakarta: BKKBN, 2013.
- BKKBN. Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi. . Jakarta Timur. 2016
- Edward III, George C (edited) Public Policy Implementing, Jai Press Inc, London-England.1984.
- Endah. Peningkatan kinerja dan tindaklanjut pemasangan penangan PUS resiko tinggi “ 4 Terlalu” : Kabupaten Bojonegoro. 2019.
- Rizki Devi. hubungan self efficacy dengan penggunaan metode kontrasepsi dalam program contraceptive for women at risk (Contra War) pada wanita pasangan usia subur (WUS) Resiko tinggi di desa wonorejo kecamatan singosasi : kabupaten malang. 2018.

Suprastiyo, A. (2020). Quality Of Birth Certificate Management Services in the Department of Population and Civil Registration Bojonegoro District.

Umi Listyaningsih. Unmet Need Keluarga Berencana di Daerah Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 55 Tahun 2020 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.